

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ahmad Rifai. (2010). *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. PT Sinar Grafika.
- Adami Chazawi, (2018). *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Edisi Revisi (UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001)*
- Bambang Sutiyoso. (2006). *Metode Penemuan Hukum (1 ed.)*. UII Press Yogyakarta .
- Budiman, M. (2020). *Kejahatan Korporasi Di Indonesia*. Setara Press.
- Budiman, M. (2021). *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (Cetakan Pertama)*. Setara Press
- Chazawi, A. (2010). *Lembaga peninjauan kembali (PK) perkara pidana: Penegakan hukum dalam penyimpangan praktik & peradilan sesat*. Sinar Grafika.
- Evi Hartini. (2005). *Tindak Pidana Korupsi* . Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. 2005. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, J. A. (2010). *Hukum Acara Pidana Indonesia (Tarmizi (ed; Edisi Kedua)*, Sinar Grafika.
- Kumorotomo, Wahyudi. 2008. *Budaya Upeti. Suap dan Birokrasi Publik*. Buana Mitra. Jakarta.
- Laola Easter. *Kriminalisasi Pasal Gratifikasi*. Malang : Intra Publishing. (2018)
- Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S. H. (2002). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Cetakan I)*. Maha Karya Pustaka .
- Sudikno Mertokusumo,(2002). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Cetakan I)*. Maha Karya Pustaka .

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. (t.t.).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP

Pasal 263 KUHP

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

C. JURNAL

- Agustina Wati Gubali. (2013). *Analisis Pengaturan Gratifikasi Menurut Undang-Undang Di Indonesia*. Lex Crimen Vol II.
- Bambang Sutiyoso. (2006). *Metode Penemuan Hukum* (1 ed.). UII Press Yogyakarta .
- Christin Pardede, T. Y. M., & Suartha, I. D. M. (2022). *Relevansi Gratifikasi Serta Impilasinya Terhadap Penyelenggara Negara*. Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum,
- Drs. Adami Chazawi, S. H. (t.t.). *Hukum Pidana materiil dan Formil Korupsi di Indonesia* . MNC.
- Gorontalo Law Review. (2020). *Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi*. 3(2).
- Iwan Irawan. (2020, Mei 5). *Sila-Sila Pancasila Terhadap Tindakan Korupsi*. Binus Univeristy .
- Laporan Pemantauan Tren Penindakan Semester I 2021*. (t.t.).
- Maman Budiman,(2016). *Problematika Penerapan Pasal 2 dan 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kajian Putusan Nomor 1283 K/*
- Maman Budiman,(2019). *Penerapan Pasal 5 Ayat (1) Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kajian Putusan Nomor 199/Pid.Sus -TPK/2018/PN.Bdg Pid.Sus/2013*
- Redaksi ACCH. (t.t.). *Gratifikasi Berdasarkan Instansi* .
- Syahril, S. N., & Lie, G. (2021). *Sanksi Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Covid-19 Dalam Perspektif Teori Pidanaaan*.
- Sugiarto, T. (2013) *Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 18, No.1 Juni 2013
- Tarigan, M. R., Ablisar, M., Sunarmi, S., & Mulyadi, M. (2022). *Tinjauan Yuridis Upaya Hukum Peninjauan Kembali Yang Diajukan Oleh Penuntut Umum Dalam Perkara Pidana*.